

**PEMETAAN PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN  
OBJEK WISATA TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN  
REMBANG**

**Tuti Wulandari<sup>1</sup>, Tri Yuniningasih<sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024)  
7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

***ABSTRACT***

*Kartini Beach Recreation Park is a potential tourist destination in Central Java, offering natural beauty with sea views and various facilities, including a swimming pool, flying fox, children's outbound, mini zoo, and historical attractions. Despite its potential, inadequate communication and collaboration among stakeholders, lack of innovation, and termination of private sector contracts with the Rembang Regency Government have hindered revitalization efforts. This study aims to identify the stakeholders involved and analyze their roles in managing the Kartini Beach Recreation Park. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document studies. The findings reveal that 27 stakeholders are involved, classified into roles as policy creators, coordinators, facilitators, implementors, and accelerators. Stakeholder mapping employs the pentahelix concept model, encompassing government, media, academia, private sector, and community. Recommendations include involving the Trade, Cooperatives, and MSMEs Service in kiosk management, implementing culture-based social media promotions, fostering private sector collaboration, and improving public facilities to enhance the park's appeal*

***Keywords: Stakeholder, Stakeholder Roles, Tourism Management***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

”Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kaya akan potensi sumber daya alam, adat istiadat, bahasa, dan perkembangan intelektual” (Amalia, 2022). Alam dan budaya yang beragam berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Mengingat pembangunan pariwisata adalah bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), oleh sebab itu pembangunan pariwisata penting untuk dikerjakan secara terpadu bersama dengan sektor

pembangunan lainnya (Andi, 2004; Handayani & Warsono, 2017).

Selain itu, pengembangan pariwisata yang optimal dapat merangsang pertumbuhan daerah, termasuk penyediaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup, dan aktivitas di industri lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Penerapan undang-undang ini akan memberikan kewenangan mandiri kepada daerah untuk mengelola sumber dayanya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengelolaan objek wisata, baik pemerintah daerah maupun pusat berperan dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan aspek penting dari bisnis lokal. Jika dikelola dengan baik dan benar maka dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengembangan pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan atau pengembangan yang terencana secara

menyeluruh sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat setempat dari segi ekonomi dan sosial ekonomi. Budaya (Sulastri, 2017). Pariwisata lokal baik berupa wisata alam, budaya, maupun buatan merupakan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah, dan pariwisata lokal membawa manfaat pengembangan pariwisata yang signifikan bagi daerah tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai beragam potensi wisata lokal yang dapat digali, diolah, dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan kesempatan rekreasi.

Kabupaten Rembang, salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, memiliki ibu kota di Rembang. Berbatasan dengan Teluk Rembang di utara, Kabupaten Tuban di timur, Kabupaten Blora di selatan, dan Kabupaten Pati di barat, daerah ini memiliki kawasan pesisir yang mendukung pengembangan wisata bahari. Ketersediaan sejumlah tempat wisata pantai mendorong bertambahnya jumlah pengunjung, memberikan efek baik bagi

perkembangan ekonomi di Rembang. Menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti, total kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang berada di posisi sepuluh besar bersamaan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah selama periode 2021 hingga 2023.

Tabel 1.1 Sepuluh Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kunjungan Wisatawan Tertinggi di Jawa Tengah (2021-2023).

Kab/Kota	2021	2022	2023	Jumlah
Klaten	1.628.177	4.816.082	6.457.057	12.901.316
Banyumas	1.498.236	2.626.837	3.526.655	7.651.728
Semarang Kota	2.670.358	577.961	3.626.307	6.874.626
Magelang	863.587	2.593.175	3.342.341	6.799.373
Temanggung	254.969	5.343.141	554.993	6.153.103
Semarang Kab	1.285.587	1.241.210	3.534.130	6.060.927
Tegal	431.523	3.810.858	944.344	5.186.725
Demak	858.375	1.575.712	2.745.040	5.179.127
<b>Rembang</b>	<b>871.136</b>	<b>2.249.579</b>	<b>1.846.136</b>	<b>4.966.849</b>
Banjarnegara	1.167.841	1.748.969	1.779.430	4.696.240

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2023 & Diolah oleh peneliti.

Melansir pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rembang meningkat signifikan pada tahun 2022, periode pasca-pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan.

Kabupaten Rembang memiliki 16 wisata alam yang aktif dikelola, salah satunya Taman Rekreasi Pantai Kartini, destinasi potensial di Jawa Tengah. Dengan pemandangan laut, taman luas, serta fasilitas seperti kolam renang, flying fox, outbound, kebun binatang mini, dan wahana anak, tempat ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata menarik. Potensi ini menjadikan Taman Rekreasi Pantai Kartini dipilih sebagai lokus penelitian.



Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sumber : Data Buku Pariwisata Jateng 2022 & Diolah oleh peneliti

Menurut informasi yang tercantum

dalam Buku Saku Pariwisata Jawa Tengah untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.. Pada tahun 2020 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 17.374 jiwa wisatawan nusantara yang datang, pada tahun 2021 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 9.952 jiwa wisatawan nusantara yang datang, pada tahun 2022 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 12.700 jiwa wisatawan nusantara.

Minimnya peminat terhadap Taman Rekreasi Pantai Kartini juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tempat tersebut sudah tidak menarik lagi atau tidak pantas karena tertinggal dari tren pasar populer saat ini. Beberapa bangunan/objek wisata sudah tidak layak untuk dikunjungi, banyak yang rusak dan terbengkalai, seperti banyak wahana yang roboh, berkarat, rapuh dan tidak dapat digunakan karena jarang digunakan.



Gambar 1. 2 Sampah di Sekitar Pantai

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, banyaknya sampah yang berserakan di area pantai menjadi salah satu penyebab sepi nya wisatawan yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini. Ranting dan batang pohon serta sampah manusia yang ada di sekitar pantai sangat mengganggu pemandangan.



Gambar 1. 3 Fasilitas Umum Rusak

Sumber : Dokumentasi peneliti

Gambar 1.3 menunjukkan kondisi tak terawat di area jembatan pinggir pantai, dengan pembatas roboh, puing-puing berserakan, kayu lapuk, serta gazebo di ujung jembatan yang

rusak dan berlubang.



Gambar 1. 4 Kios Rusak dan Terbengkalai

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.4 di atas kios yang seharusnya dapat membantu masyarakat rembang untuk berpenghasilan pun juga terbengkalai karena sepi nya pengunjung yang datang.



Gambar 1. 5 Kebun Binatang Terbengkalai

Sumber : Dokumentasi peneliti  
Berdasarkan gambar 1.5 kawasan yang dulu nya kebun binatang yang seharusnya bisa ditempati oleh satwa sekarang terbengkalai dan rimbun oleh tanaman liar.

Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang mengalami berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Pada 31 Maret 2018, Pemerintah Kabupaten Rembang mengakhiri kerja sama dengan CV Rembang Jaya Sentosa (Suaramerdeka.com, 2018). Selanjutnya, pada 2019, kontrak pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini dengan PT Mantingan Karya Aditya (MKA) juga berakhir (Suara Baru, 2019). Selain itu, Taman Rekreasi Pantai Kartini menjadi sorotan akibat kasus korupsi retribusi pada 2019-2021, dengan kerugian negara sekitar Rp 113 juta. (Radar Kudus, 2023). Kondisi Taman Rekreasi Pantai Kartini semakin memburuk setelah gagal direvitalisasi pada 2023. Sejumlah fasilitas seperti kebun binatang mini, kios, mushola, dan dermaga mengalami kerusakan parah dan terbengkalai (Lingkarjateng.id, 2023). Dilansir dari Suaramerdekamura.com (7 Agustus 2023), Sekretaris Daerah Rembang mengungkapkan bahwa Dinbudpar belum pernah melaporkan kondisi terkini Taman

Kartini ke Bupati, meskipun banyak fasilitas dan aset yang rusak dan terbengkalai. Hal ini mencerminkan kurangnya komunikasi dan kerja sama antar-stakeholder, minimnya inovasi dari pengelola, serta pemutusan kontrak pihak swasta dengan Pemkab Rembang. Akibatnya, revitalisasi Taman Rekreasi Pantai Kartini gagal, dan tempat tersebut semakin terbengkalai.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana peran setiap *stakeholders* dalam usaha pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang?

### **Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Identifikasi pada *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
2. Menganalisis peran dari para *stakeholders* dalam usaha pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.

### **Kerangka Teori**

Menurut George J. Gordon administrasi publik adalah segala proses baik yang dilakukan secara perorangan ataupun dilakukan secara organisasi dan berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang diterbitkan oleh legislatif, eksekutif serta pengadilan; dan Menurut Marshall E. Dimock., Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan politiknya.

### **Manajemen Publik**

”Manajemen Publik memiliki artian sebagai upaya seseorang yang

bertanggungjawab di dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (manusia dan mesin) guna tercapainya tujuan organisasi” (Keban, 2008).

Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa manajemen publik adalah upaya yang merujuk pada manajemen instansi pemerintah.

### **Identifikasi Stakeholder**

Klasifikasi *stakeholder* menurut Maryono di dalam sebuah jurnal (Yosevita.L, 2015) mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi 3 adalah sebagai berikut :

1. *Stakeholder* Primer, adalah *stakeholder* yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung serta memiliki kepentingan yang pokok
2. *Stakeholder* Kunci, adalah *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kepentingan, pengaruh, serta kewenangan yang cukup penting di dalam pengambilan keputusan kebijakan
3. *Stakeholder* Sekunder, merupakan *stakeholder* yang

tidak mempunyai kepentingan secara langsung akan tetapi akan selalu penting untuk dilibatkan

*Pentahelix* menurut Arif Yahya dalam Tri Yuningsih et al., (2019) merupakan kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata, yaitu diantaranya : *Academician, Business, Community, Government* dan *Media*. Biasa disingkat ABCGM.

### **Peran Stakeholder**

Bryson dalam (Hidayat, 2020) menyatakan bahwa dalam menganalisis peran *stakeholder* dapat dilakukan dengan memetakannya pada matrix dua kali dua yang dibedakan berdasarkan *interest* (minat) dan *power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dan berdampak terhadap permasalahan yang ada. Menganalisis peran pada setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, menurut Nugroho dalam jurnal (Hidayat, 2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu :

1. *Policy creator*, yang memiliki peran untuk mengambil keputusan.
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam proses koordinasi di dalam proses Kerjasama yang terjadi.
3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk menyiapkan segala sarana prasarana pada proses implementasi tersebut.
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan tersebut.
5. akselerator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran penunjang keberhasilan sebuah kebijakan yang berdampak pada kecepatan pelaksanaan dari target awal pencapaian.

### **Manajemen Parawisata**

“Manajemen pariwisata di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat lokal, maupun sektor swasta untuk mengelola destinasi pariwisata secara bersama-sama” Nugroho (2009). Stephen J. Page (2009) dalam bukunya *Tourism*

Management menjelaskan bahwa manajemen pariwisata adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengembangkan industri pariwisata dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan dan memaksimalkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Kami menerapkan pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini. Tipe data yang digunakan bersifat deskriptif. Data dikumpulkan dengan berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian ini adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang. Untuk memilih informan dalam penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. “Metode ini bertujuan untuk memilih sumber data berdasarkan pertimbangan bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu yang ingin diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang dibahas” (sugiyono, 2019) yang diperuntukan kepada Kepala Bidang Destinasi



Pariwisata Dinbudpar Rembang, Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Rembang, Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DLH Rembang, Staff Bidang Bangunan DPU Taru Rembang, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Rembang, Kepala Dishub Rembang, Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPKAD Rembang. Analisis dan interpretasi data analisis (Miles & Hubner.1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta kualitas data menggunakan triangulasi sumber.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Identifikasi *Stakeholder***

#### *1. Stakeholder Primer*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang terlibat dan bertanggung langsung pada pengelolaan

Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang. Keterlibatan Dinbudpar Rembang dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini Kabupaten Rembang, yaitu *stakeholder* yang mengelola Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, karena kewenangan pengelolaan itu ada di Dinbudpar Rembang. Oleh karena itu Dinbudpar Rembang pun juga yang mengurus dan mengelola mengenai pembayaran sewa kios UMKM, air, listrik, kebersihan serta tenaga harian lepas (THL).

#### *2. Stakeholder Sekunder*

Bappeda, DLH, Satpol PP, Dishub, dan masyarakat Rembang berperan sebagai stakeholder sekunder dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini. Bappeda mengakomodasi usulan pengelolaan dalam dokumen RKPD, DLH mengawasi pengelolaan limbah, Satpol PP menjaga keamanan acara tahunan, dan Dishub menganalisis dampak lingkungan

serta sarana transportasi. Sementara itu, masyarakat berkontribusi melalui kegiatan usaha dan dukungan dalam kegiatan wisata. Keterlibatan mereka berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan objek wisata.

### 3. *Stakeholder* Kunci

Dinbudpar Rembang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang signifikan dalam pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang sehingga dapat dikatakan sebagai *stakeholder* kunci. Dengan otoritas yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam menetapkan kebijakan yang strategis untuk pengelolaan objek wisata taman kartini Kabupaten Rembang.

## **Analisis Peran Stakeholder**

### 1. *Policy Creator*

Kolaborasi antar Dinas Kebudayaan dan pariwisata Rembang dan Bappeda Rembang dalam Menyusun, merancang dan melaksanakan kebijakan Perda Kabupaten Rembang No. 12

Tahun 2019, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPPARKAB) adalah contoh nyata bagaimana *stakeholder* bekerja sama sebagai *policy creator*.

### 2. Koordinator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang berperan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini, berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder*. DPU Taru berperan sebagai tim teknis Dishub menangani sarana jalan dan analisis dampak lingkungan saat hari besar, DLH mengelola limbah dan retribusi lingkungan, serta Satpol PP menjaga keamanan acara. BPPKAD mengelola pendapatan dari tiket masuk dan menyetorkannya ke kas daerah. Kolaborasi dan komunikasi antar-*stakeholder* menjadi pondasi penting untuk memaksimalkan pengelolaan, meningkatkan potensi wisata, dan memastikan pengelolaan

Taman Kartini berjalan optimal.

### 3. Fasilitator

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berperan sebagai fasilitator utama, Dinas Perhubungan menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum serta menyusun rencana pengelolaan strategis bersama stakeholder. Dinas Ketenagakerjaan bertugas melindungi tenaga kerja dan memberikan tunjangan BPJS. Sementara itu, DPU TARU memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk melibatkan masyarakat dan swasta dalam pemeliharannya.

### 4. Implementor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang berperan penting sebagai implementor dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini, bertugas mewujudkan visi, misi, dan rencana pengelolaan yang sesuai dengan kebijakan daerah.

Bappeda juga mengakomodir dan menyaring usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar selaras dengan visi Kabupaten Rembang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertindak sebagai pengelola utama Taman Rekreasi Pantai Kartini, memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan, koordinasi dengan stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, DPU, SATPOL PP, Dinas Perdagangan dan lainnya, serta penyediaan sarana prasarana. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas izin lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pengaturan retribusi yang harus dibayarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola.

### 5. Akselerator

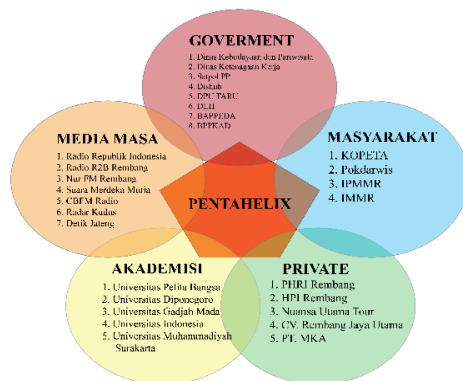
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas pengelolaan langsung Taman Rekreasi Pantai Kartini, termasuk pemeliharaan fasilitas seperti kolam renang, taman, alat bermain, jembatan, dan gazebo,

dengan dukungan tenaga harian lepas (THL). Dinas ini juga menyewakan kios kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Promosi pariwisata didukung oleh berbagai pihak, seperti Radio R2B, RRI, CBFM, dan Nur FM melalui siaran radio; Suara Merdeka, Radar Kudus, dan Detik Jateng melalui media cetak; serta komunitas seperti Ikatan Putra Putri Maritim Rembang (IPPMR), Ikatan Mas Mbak Rembang (IMMR), dan Komunitas Pendamping Destinasi Wisata (KOPETA) melalui media sosial. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membina usaha jasa akomodasi dan restoran, sementara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) memfasilitasi komunikasi antarpramuwisata. Nuansa Utama Tour berperan dalam pengembangan pariwisata melalui layanan perjalanan domestik dan internasional. Akademisi dari beberapa perguruan tinggi turut melakukan

penelitian untuk mendukung kemajuan pariwisata. Pokdarwis berkontribusi dengan mengembangkan potensi wisata desa, mendorong sektor pariwisata menjadi lebih aktif dan maju.

### Pemetaan Stakeholder

Setelah mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dalam program, pemetaan dilakukan menggunakan konsep *Pentahelix* yaitu kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata, yang terdiri dari: *Academician, Business, Community, Government* dan *Media*.



Gambar 1.6 Konsep *Pentahelix*

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi

dan analisis peran *stakeholder*, menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai stakeholder yang berperan sesuai klasifikasi: primer, sekunder, dan kunci. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menjadi *stakeholder* utama yang berperan sebagai pengelola, pembuat kebijakan, fasilitator, koordinator, implementor, sekaligus akselerator. Stakeholder lain, seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, media, komunitas, akademisi, dan private, mendukung pengelolaan melalui koordinasi, fasilitasi, implementasi, dan percepatan pengembangan wisata. Sinergi antar *stakeholder* ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif pada masyarakat serta perekonomian Kabupaten Rembang.

### **Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan pada jurnal ini, kami mengemukakan rekomendasi terkait apa yang mungkin dilakukan dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang

terlibat dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

1. Ada nya hasil penelitian lapangan, dari sekian banyak stakeholder ternyata ditemukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM merasa tidak dilibatkan karena kios yang ada di Taman Rekreasi Pantai Kartini dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga untuk kedepannya diharapkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengelolaan kios , UMKM yang ada di Taman Rekreasi Pantai Kartini
2. Sosial media seperti instagram tidak di kelola dengan baik karena terakhir upload ditahun 2023, maka untuk kedepannya pengelola dapat menggunakan instagram dan media sosial lainnya seperti tiktok, facebook, x dan youtube dengan membuat konten dan melakukan promosi yang lebih menarik dan berwawasan budaya agar dapat menarik minat wisatawan.

3. Karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri yang mengelola Taman Rekreasi Pantai Kartini, kedepannya diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta agar dapat mengoptimalkan pengelolaan taman rekreasi pantai kartini.
4. Adanya hasil penelitian lapangan, banyak fasilitas umum yang terbengkalai bahkan rusak, diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memperbaiki serta melakukan perawatan terhadap fasilitas umum dan sarana prasarana yang ada pada Taman Rekreasi Pantai Kartini agar dapat meningkatkan minat pengunjung untuk datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Eko Putra dkk. *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder*. Universitas Brawijaya Press
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pitana dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Sugiyono. 2019. *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta

### Jurnal :

- Bellaastuti, D.B. (2020). Analisis Jaringan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri. Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
- Damanik, J., Rindrasarih, E., Cemporaningsih, E., Marpaun, F., Raharjana, D. T., Brahmantya, H., & Wijaya. (2018). *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Gadjah Mada University Press.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 8(2),132-153
- Fitri dan Hardi. 2017. ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG. Volume 6 Nomor 3.
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*. VOL. 08 NO. 02

Rakhmawaty. 2009. KAJIAN SUMBERDAYA PANTAI UNTUK PENGELOLAAN TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH. Halaman 1-2

Reed et al., (2009). Who's in and why? A typology of *stakeholder* analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* 90 (2009) 1933–1949

Risa Amalia K dkk. 2022. PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN PANTAI PULAU MERAH KABUPATEN BANYUWANGI SEBAGAI DESTINASI WISATA BAHARI. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 16 (1) (2022) 52-60

Setiawan,B.,&Nurcahyanto,H.(2020 ). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pendurung Kota Semarang. *Journal of publik policy and management review*, 9(2),124-144

Yosevita,L. (2015). Implementasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Ekowisata Ditaman Nasional Manusela (TNM) DiKabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforesti*, 10(1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

### **Lain-lain:**

Buku Saku Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2022

Jateng Report.  
<https://jatengreport.com/bacaberita/1926/wisata-pantai-kartini-rembang-banyak-simpan-situs-sejarah> diakses pada 06 Maret 2024. Pukul 13.45 WIB

Visit Jawa Tengah  
<https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/unduh> diakses pada 06 Maret 2024. Pukul 15.00 WIB

